

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI KECAMATAN UKUI TAHUN 2015

Puti Nilam Suri

Email: putinilam22@gmail.com

Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The title of this research is the Participation of Political Society in the Election of Head of Pelalawan Regency in Ukui Sub-district 2015. Based on the background The implementation of democracy in Indonesia is growing, one of which is realized in the implementation of regional head election. The existence of the election of regional heads of each individual or community group can manifest their will voluntarily, without influence from anyone. In this case every member of the community can directly vote in the election and be active in attending his political activities. But the liveliness of community members both in voting and campaign activities must be driven by an attitude of orientation that is so high. Besides that, awareness and motivation of citizens in political activity is very important to sustain the political participation level on the election of regional head. Due to the enthusiastic attitude of citizens in political participation it certainly leads to the consequences on a stable political order. So is the case in Kecamatan Ukui Pelalawan District where the low level of public participation against the election of Head of Region in 2015.

The type used in this study is quantitative with Comparative Causal Studies. Data collection techniques used in this study are, questionnaires (questionnaires), interviews and documentation. The location of the research was conducted in Kecamatan Ukui. Based on the results of analysis conducted on research data to reveal and answer research questions relating to community participation in Pelalawan District elections in Kecuk ukui can be concluded that the participation of people in Ukui Sub-district is very low in comparison with other districts this is caused by several factors Namely socialization, social economy, political belief and political awareness.

Keywords: Community participation, Election of Head of Region

B. PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki peranan penting didalam urusan negara, atau demokrasi merupakan kekuasaan rakyat berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasinya suatu negara. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Gagasan otonomi daerah melekat pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang sangat berkaitan dengan demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan baik tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Agar demokrasi bisa terwujud maka daerah harus memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya pemekaran, membuat daerah tersebut membutuhkan seorang kepala daerah yang bertugas memimpin birokrasi, menggerakkan jalannya roda pemerintahan yang meliputi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan, sehingga dilakukanlah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 mengenai tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah, yang merupakan tonggak baru penegakkan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia.

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh ‘Herbert McClosky’ bahwa partisipasi politik

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu seyogyanya mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam konstest kehidupan politik.

Partisipasi politik amat penting dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta pengawasan penghitungan suara.

Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat. Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung

dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatankegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.

Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena ini selalu muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Pada tahun 2015 Kabupaten Pelalawan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang memiliki 12 Kecamatan. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan pemilihan bupati telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu :

- 1. H.M. HARRIS & Drs. H. ZARWEDAN, MM**
- 2. ZUKRI & Drs.H.ABDUL ANAS BADRUN**

Hasil rekapitulasi suara untuk semua calon adalah untuk pasangan H.M. Harris dan Drs H. Zarwedan, MM memperoleh suara sebanyak 68.618 atau 50,57% dan pasangan Zukri dan Drs.H.Abd. Anas Badrun memperoleh suara sebanyak 67.080 atau 49,43% dengan jumlah pemilih adalah 195.248 suara yang tidak sah sebanyak 2.841.

Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi di beberapa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pilkada di Berbagai Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015

No	Nama kecamatan	Jumlah DPT+DPTb. 1	Jumlah suara sah	Jumlah suara tidak sah	Tingkat partisipasi masyarakat
1	Pangkalan Kerinci	37.456	25.610	482	69.66%
2	Pangkalan Kuras	32.123	21.297	513	67.90%
3	Ukui	22.627	15.053	301	67.86%
4	Pangkalan Bunut	16.645	11.441	467	71.54%
5	Langgam	15.503	10.838	193	71.62%
6	Kerumutan	13.865	10.653	136	77.81%
7	Kuala Kampar	12.122	8.201	90	68.40%
8	Teluk Meranti	10.789	7.323	44	68.28%
9	Bandar Petalangan	9.181	7.115	203	79.71%
10	Pelalawan	8.652	6.261	170	74.33%
11	Bandar Seikijang	8.638	5.879	140	69.68%
12	Bunut	7.747	6.027	102	79.11%
Jumlah		195.248	135.698	2.841	70.96%

Sumber: KPU Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa partisipasi memilih pada Pilkada tahun 2015 tertinggi di Kecamatan Bandar Petalangan dengan persentase 79.71% , dan partisipasi terendah berada di Kecamatan Ukui dalam persentase 67.86% dari data olahan yang di peroleh dari jumlahDaftar Pemilih Tetap (DPT), DaftarPemilih Tambahan (DPTb) yang ada.Setelah melalui pemilihan dimasing-masing TPU, ditemukan surat suara yang sah dan tidak sah.

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pilkada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi (pilkada) di Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap *money politic* dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, golput menjadi suara mayoritas. Hal ini terjadi di Kecamatan Ukui pada pilkada 2015. Masyarakat Kecamatan Ukui dalam kehidupan sehari-harinya hanya menjadi buruh dan bertani dan cenderung apatis terhadap politik.

Kesadaran politik mereka masih rendah. Hal ini bisa dilihat dengan ditemukannya praktik *money politic*, dimana calon yang menghasilkan uang lebih banyak, itulah yang dipilih. Jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka lebih memilih untuk golput. Fenomena yang demikian tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat Kecamatan Ukui dalam pilkada Kabupaten Pelalawan.

Oleh karena itu, partisipasi mereka sangat penting untuk ditilik guna mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pilkada

Kabupaten Pelalawan. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentu kesadaran politik mereka juga rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan teknis dalam pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berantakan memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI KECAMATAN UKUI TAHUN 2015”**

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan berbagai paparan yang dikemukakan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi

D. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Pengertian demokrasi secara Harfiah terdiri dari dua kata “*Demos*” yang berarti rakyat, dan “*Kratos*” berarti kekuasaan atau “Berkuasa” dengan kata lain demokrasi yaitu rakuat yang berkuasa atau “*Government or rule by the people*”. Secara Historis di Yunani Kuno, Romawi dan Italia “kata demokrasi” disebut dengan istilah “Pemerintahan Rakyat”. Dengan menggunakan istilah pemerintahan rakyat orang Yunani seperti kita lihat, telah menciptakan istilah “Demokrasi”. Sedangkan orang Romawi berdasarkan bahasa asli Latin, mereka menamakan pemerintahannya dengan nama “Republik”, kemudian orang Italia memberikan nama “Pemerintahan Rakyat” yang terdapat di beberapa kota disebut “Negara Kota” mereka.

2. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikutserta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan pilihan pemimpin.

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi ialah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik atau disebut kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pemimpin secara langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Miriam Budiardjo menyimpulkan secara umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contatcting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut Samuel P. Huntington, jenis – jenis perilaku politik antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan dalam kampanye.
- b. Lobbying
- c. Kegiatan organisasi
- d. Mencari Koneksi
- e. Tindakan kekerasan (*violence*), juga dapat berupa partisipasi politik yakni upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peranan-peranan yang harus dijalankan oleh individu (Peter L. Berger dan Luckmann).

2. faktor status sosial ekonomi.

Status sosial ekonomi menurut Ramlan Surbakti ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, pengeluaran ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku memahami ilmu politik, fakto-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

1. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup.
2. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat atau tidak.

3. *Pemilihan Kepala Daerah*

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 24 ayat (5) yang berbunyi: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, hal ini tertuang dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Tahapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah meliputi:

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap
2. Pendaftaran calon Kepala daerah dan Wakil kepala daerah
3. Penetapan calon Kepala daerah dan Wakil kepala daerah
4. Kampanye
5. Masa tenang
6. Pemungutan suara
7. Penghitungan suara
8. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang artinya hasil penelitian

berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.

1.5.1 Jenis Data

- Data Primer merupakan data hasil dari kuisisioner/angket yang disebar di lokasi penelitian atau dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Ukui.
- Data Sekunder merupakan data yang sudah jadi, seperti data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pelalawan.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ukui.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian menggunakan Studi Kausal Komperatif (*causal comparative research*), atau hubungan sebab akibat adalah

1.5.3 Populasi dan sampel

- Populasi
Adapun populasi, keseluruhan data dalam penelitian ini adalah berjumlah 22.397 orang.
- Sampel
besaran sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Kuesioner (angket), Wawancara, Dokumentasi

E. PEMBAHASAN

1. Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin :

Berikut distribusi responden berdasarkan jenis kelaminnya.

Tabel 3.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	40	40%
Perempuan	60	60%
Jumlah	100	100

Sumber: Data hasil olahan,2017

Dari tabel 3.1 tentang responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis laki-laki. Dimana responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 orang. Hal itu disebabkan karena kaum perempuan yang sering berkumpul untuk mengobrol sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan tanya jawab kepada responden. Banyaknya responden yang berjenis kelamin perempuan yang ditemui oleh peneliti lebih disebabkan karena perempuan lebih banyak memiliki aktivitas di rumah di bandingkan dengan kaum laki-laki.

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.2

Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	persentasi
1	17-30 Tahun	43	43%
2	31-40 Tahun	23	23%
3	41-50 Tahun	16	16%
4	50 Tahun Keatas	18	18%
	Total	100	100%

Sumber: Data Hasil Olahan,2017

Berdasarkan Tabel 3.2 Kecamatan Ukui, kelompok usia 17-30 lebih dominan dalam menggunakan hak pilihnya dibandingkan kelompok usia lainnya, hal ini wajar dikarenakan penduduk Kecamatan Ukui didominasi usia ini.

3.1.2 Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	Sarjana (S1,S2,S3)	4	4%
2	Diploma(D1,D2,D3)	2	2%
3	SMA/Sederajat	35	35%
4	SMP/Sederajat	21	21%

5	SD/Sederajat	38	38%	n diri		
	Total	100	100%	Telah didaftarkan oleh panitia PPS	75	75%
				Jumlah	100	100%

Sumber: data hasil olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan pendidikan di Kecamatan Ukui mayoritas pendidikan terakhir SD/Sederajat dengan persentase 38%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang lebih banyak mengisi angket yang telah penulis sebarakan yaitu masyarakat yang berpendidikan SD/Sederajat.

3.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Agama

Tabel 3.4 Responden Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	76	76%
2	Protestan	14	14%
3	Katolik	10	10%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: data hasil olahan 2017

Berdasarkan Tabel 3.4 responden berdasarkan agama, bahwa pemilih di Kecamatan Ukui yang memberikan suara pada pilkada kabupaten Pelalawan tahun 2015, yaitu 76 % beragama islam, 14% beragama protestan dan 10% beragama katolik.

3.2 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada teori tentang partisipasi politik

3.2.1 Partisipasi dalam pendaftaran pemilih

Tabel 3.5 Jawaban Responden Terhadap Partisipasi Dalam Pendaftaran Pemilih

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Keinginan secara spontanitas untuk mendaftarkan	25	25%

Sumber: data hasil olahan, 2017

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pendaftaran pemilih yang berkeinginan secara spontan untuk mendaftarkan diri sangat rendah yaitu 25% sedangkan yang telah di daftarkan oleh panitia PPS yaitu 75%.

3.2.2 Keikutsertaan Dalam Kampanye

Tabel 3.6 Jawaban Responden Terhadap Keikutsertaan Dalam Kampanye

No	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1	Ingin mendengarkan visi misi calon Kepala Daerah	45	45%
2	Sebagai hiburan	55	55%
	Jumlah	100	100%

Sumber : data hasil olahan, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye yang ingin mendengarkan visi dan misi calon Kepala Daerah berjumlah 45% sedangkan sebagai hiburan yaitu 55%.

3.2.3 Keikutsertaan dalam memberikan suara

Tabel 3.7 Jawaban Responden Terhadap Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan suara

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ikut memilih	40	40%
2	Tidak ikut memilih	60	60%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data hasil olahan, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden masyarakat 40% masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015 sedangkan yang tidak ikut memilih yaitu 60%.

Dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Ukui partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Pelalawan tahun 2015 masih rendah.

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Partisipasi Politik Masyarakat Rendah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Ukui 2015

3.3.1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi meliputi pamflet, brosur, spanduk, baliho, Sosialisasi berfungsi agar mahasiswa mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga menciptakan kemungkinan untuk turut berpartisipasi.

Tabel 3.8 tentang apakah pamflet mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	78	78
2	Tidak	22	22
	Jumlah	100	100

Sumber :data hasil olahan,2017

Di lihat dari tabel3.8 diatas bahwa pamflet mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kecamatan Ukui.

Tabel 3.9 tentang apakah spanduk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	85	85%
2	Tidak	15	15%
	Jumlah	100	100%

Sumber:data hasil olahan,2017

Dari tabel 3.9 diatas bahwasanya sebanyak 85% masyarakat mengatakan spanduk sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Tabel 3.10 tentang apakah stiker mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	40	40%
2	Tidak	60	60%
	Jumlah	100	100%

Sumber:data hasil olahan,2017

Dari tabel 3.10 diatas bahwasanya sebanyak 40% masyarakat mengatakan stiker tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

1.3.2 Faktor sosial ekonomi

Kecamatan Ukui merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet. Status sosial pemilih juga menentukan seseorang untuk menjatuhkan seorang untuk menjatuhkan pilihan dalam sebuah pemilihan. Hal ini disebabkan status sosial seseorang akan menentukan pilihan apakah pemilih tersebut adalah orang terpendang ataukah seseorang yang mempunyai ekonomi yang baik atau juga sebaliknya. Perilaku memilih seseorang terikat dalam lingkaran sosialnya, misalnya keluarga, rekan-rekan tempat kerja dan lainnya. Faktor ini ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan pemilih. Tingginya pendidikan dan pekerjaan dari seorang pemilih akan

membangun sikap dari calon pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.

persoalan untuk mencapai tujuan menjadi faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pelaku dalam pemilihan umum. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ketajaman dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik yang diterima semakin meningkatkan dan menciptakan minat kemampuan berpolitik. Responden yang hanya tamatan jenjang pendidikan rendah SD sebanyak 38 orang (38%). Ini dapat dikatakan bahwa memang tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Ukui termasuk dalam level rendah. Hanya ada 4 orang responden (4%) yang merupakan tamatan Sarjana. Rendahnya pendidikan responden dianggap mempengaruhi responden untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, karena apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi maka kesadaran akan kewajiban politiknya juga meningkat dan begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pendidikan seseorang rendah maka, kesadaran akan kewajiban politiknya juga rendah sehingga memutuskan untuk tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Rendahnya pendidikan juga membuat pemilih kekurangan informasi mengenai Pilkada mulai dari kandidat-kandidat pilkada bahkan berita-berita tentang pilkada. Iwan seorang petani yang hanya pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengaku bahwa ia tidak mengikuti pilkada karena sedang bekerja di kebun demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Berikut kutipan wawancaranya:

“ saya tidak memilih waktu pemilihan kepala bupati kemarin karena saya sedang bekerja di kebun sawit demi memnuhi kebutuhan hidup saya. Saya Cuma seorang petani, saya juga hanya tamat SD. Jadi apapun akan saya kerjakan demi kebutuhan hidup selagi itu masih halal”.

Dari wawancara diatas informan menjelaskan alasannya tidak ikut memilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 lalu karena ia harus kekebun sawit demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia yang mengaku hanya tamatan SD mengaku sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga menjelaskan kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pilkada didaerahnya yang menyebabkan ia menjadi cenderung acuh terhadap pesta demokrasi politik dan harus kehilangan hak politiknya dalam pemilu.

Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi. mayoritas masyarakat yang diwawancarai lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS memberikan suara, karena faktor ekonomi dimana masyarakat lebih memilih bekerja dari pada hilang penghasilannya dari pada hadir di TPS yang berdampak pada berkurangnya penghasilan, sementara tuntutan ekonomi keluarga semakin kuat.

1.3.3 Kepercayaan politik

Kepercayaan seorang terhadap pemilu juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini misalnya seseorang percaya bahwa dengan adanya pemilu akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupannya. Mereka berharap dengan adanya pemilu tersebut akan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan mensejahterakan rakyat.

Tabel 3.12 tentang alasan masyarakat memilih kepala daerah

No	Jawaban responden	Jumlah	persentas e
1	Karena ingin pemimpin yang amanah	44	44%
2	Karana ada imbalan(mon ey politic)	56	56%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data hasil olahan,2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang memberikan hak suaranya agar memiliki pemimpin yang amah yaitu 44 %, mereka beranggapan kurangnya kepercayaan terhadap calon kepala daerah karena janji-janji para calon kepala daerah tak kunjung di realisasikan ketika mereka sudah berhasil duduk sebagai pejabat. Sedangkan % memberikan hak suaranya karena telah di beri uang atau barang dari para calon kandidat.

Dalam wawancara dikatakan alasan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dikarenakan janji-janji para kandidat tak kunjung direalisasinya ketika mereka sudah berhasil duduk sebagai pejabat. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin dan parpol mengakibatkan rakyat kurang antusias dalam pilkada. Sehingga disarankan kepada para pemimpin yang ingin menjadi wakil rakyat, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap pemilu, maka jangan hanya membuat janji, tapi harus adanya program yang berpengaruh kepada mereka. Selain itu kurangnya kepercayaan akibat adanya politik uang yang dilakukan kandidat peserta pemilu kepada calon-calon pemilih.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan parpol mengakibatkan rakyat kurang antusias dalam pilkada. Sehingga disarankan kepada para pemimpin yang ingin menjadi wakil rakyat, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap pilkada, maka jangan hanya membuat janji, tapi harus adanya program yang berpengaruh kepada mereka. Selain itu kurangnya kepercayaan akibat adanya politik uang yang dilakukan kandidat peserta pilkada kepada calon-calon pemilih.

1.3.4 Kesadaran Politik

Kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pilkada juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Sebagai

warga negara sudah sepatutnya sadar bahwa berpartisipasi dalam pilkada itu merupakan kewajiban setiap warga negara dalam hal mewujudkan demokrasi yang baik dan berasal dari rakyat. Kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat.

Rendahnya kesadaran politik masyarakat juga kerap kali menjadi pemicu rendahnya partisipasi pada pilkada. Tidak banyak masyarakat yang masih kurang sadar tentang betapa pentingnya berpartisipasi dalam pilkada seperti ikut kampanye dan memberikan hak suaranya dalam pilkada. Dalam permasalahan ini saya mewawancarai seorang warga yang menjelaskan bahwa dirinya tidak memilih dalam pilkada di Kecamatan Ukui. Beliau bernama Ari yang bekerja sebagai pedagang warung didaerahnya, berikut kutipan wawancaranya:

“saya tidak memilih pada pemilihan bupati tahun 2015 karena saya tidak tertarik sama calon-calonnya, jadi malas mau memilih. Lebih baik saya jualan dari pada milih”.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dirinya tidak tertarik oleh kandidat calon kepala daerah tahun 2015 lalu dan akhirnya tidak memberikan hak suaranya pada pilkada saat itu. Seharusnya sebagai warga negara hendaknya memiliki kesadaran tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu guna mewujudkan pesta demokrasi.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pilkada. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda.

F. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Ukui dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 masih tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan perubahan kebiasaan yang malas untuk memberikan hak suara. Karena satu suara dapat merubah nasib rakyat dan dengan satu suara dapat menentukan pemimpin yang layak dan mampu merubah rakyat.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain yaitu:
 1. faktor Sosialisasi, bahwa masyarakat di Kecamatan Ukui dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015 adalah kurangnya partisipasi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Hal ini terlihat dari data persentase pilkada yang berpartisipasi cukup rendah. Penyebab utama dari ketidakberhasilan ini terdapat pada kurangnya pengetahuan masyarakat pemilih akan kandidat atau calon yang akan diusung atau dipilih masyarakat saat pemilihan tersebut berlangsung serta minimnya sosialisasi yang dilakukan KPUD.
 2. faktor sosial ekonomi dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi politik menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat termasuk dalam katagori menengah. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada dikarenakan semakin rendahnya tingkat pendidikan maka akan semakin rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Pekerjaan utama responden dalam penelitian ini adalah petani, dimana mereka beranggapan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan terpaksa melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga mempengaruhi partisipasi politik mereka. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa status sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Ukui masih tergolong sedang. Dengan pengetahuan dan penghasilan yang terbatas yang mereka miliki maka cenderung menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.
 3. faktor kepercayaan politik masyarakat dapat masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah di periode sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum/kepala daerah karena mereka menganggap hasilnya akan sama saja baik mereka berpartisipasi politik atau tidak berpartisipasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Ukui terhadap pemerintah (politik) termasuk rendah. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi.
 4. Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Dalam hal ini

masyarakat Kecamatan Ukui tingkat kesadaran politiknya masih rendah.

4.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi proses Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Sebaiknya panitia Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan melakukan sosialisasi ke daerah pedalaman karena hal ini sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara pada Pilkada.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan hendaknya menerapkan kebijakan yang pro rakyat, sehingga persepsi negatif masyarakat saat ini kepada pemerintahan dapat berubah menjadi positif kembali seiring dengan penepatan janji pemerintah yang telah diumbar-umbar ketika sebelum menjadi bagian pemerintahan.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008

Sastrodimojo, Sudjono. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, 1995

Subakti, Ramlan. *memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widayana Indonesia, 1992.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2009. *"Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Amiruddin dan A.Zaini Bisri. 2005. *Pilkada Langsung Problem & Prospek Sketsa*

Singkat Perjalanan Pilkada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A.Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.